

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XVIII/Desember - 2017

07 | Terbentuk Karakter Bangsa yang Kuat,
Harapan Presiden
Menyongsong Generasi
Emas 2045

16 | Praktik-praktik Baik
Program PPK Ini
Tak Ubah Kurikulum
Di Sekolah

26 | Laporan dari Festival Seni Europalia 2017
Kebudayaan Nasional
Indonesia Menjadi
Bintang Europalia 2017



Penguatan Pendidikan Karakter:

Bekal Generasi Emas 2045

Daftar Isi



04 Salam Pak Menteri

FOKUS

06 Perjalanan PPK Sejak 2016 Hingga 2017

07 Terbentuk Karakter Bangsa yang Kuat, Harapan Presiden Menyongsong Generasi Emas 2045

09 Pendidikan Karakter, Jiwa Utama dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia

12 Lima atau Enam Hari, Sekolah yang Menentukan

14 Guru, Aktor Utama Pelaksanaan PPK PPK Mengembalikan Jati Diri Guru sebagai Pendidik

16 Praktik-praktik Baik Program PPK Ini Tak Ubah Kurikulum Di Sekolah

22 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)

Resensi Buku
A-Z Pendidikan Karakter **24**

Laporan dari Festival Seni Europalia 2017
Kebudayaan Nasional Indonesia Menjadi Bintang Europalia 2017 **26**

Bangga Berbahasa Indonesia
Penggolongan Nomina: orang, Buah, Ekor **33**

25 Infografis Perpustakaan

Kajian
29 Revolusi Mental Pendidikan

Bangga Berbahasa Indonesia
34 Senarai Kata Serapan

Sapa Redaksi

Penguatan Pendidikan Karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyongsong generasi emas 2045. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas merupakan nilai karakter yang diinginkan ada pada setiap generasi emas ini. Presiden Joko Widodo punya perhatian besar akan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ditandatangani Presiden pada September 2017

yang lalu. Dengan ditandatanganinya perpres ini diharapkan pendidikan karakter dapat berjalan optimal di sekolah-sekolah umum, pesantren, dan madrasah.

Presiden percaya, karakter bangsa yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti menjadi modal kuat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan dihormati negara-negara lain. Seiring dengan lahirnya perpres ini, cakupan PPK menjadi lebih luas. PPK tidak hanya dilakukan pada satuan pendidikan formal, melainkan juga pada satuan pendidikan nonformal, dan informal dengan melibatkan dan bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memulai rintisan sekolah yang menyelenggarakan PPK sejak 2016 dan terus dilakukan hingga pada 2020 target implementasi penuh PPK dapat terwujud. Kemendikbud menyiapkan aturan turunan perpres tersebut yang menjadi petunjuk teknis bagi satuan pendidikan dalam mengimplementasi PPK. Tentu disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi, serta kearifan lokal daerah setempat.

Perkembangan mengenai PPK itulah yang kami sajikan dalam rubrik **Fokus** edisi kali ini. Sebelumnya pada 2016, *JENDELA* juga pernah membahas mengenai PPK. Bedanya, di edisi ini kami sajikan sejumlah contoh implementasi PPK di sejumlah sekolah yang menjadi percontohan. Lewat contoh tersebut diharapkan sekolah-sekolah lain dapat mengimplementasikannya.

Pada rubrik lainnya, kami hadirkan tema kebudayaan yang menyuguhkan laporan dari Belgia tentang pelaksanaan Festival Seni Europalia 2017 yang diselenggarakan sejak Oktober 2017 dan akan berakhir pada Januari 2018 mendatang. Indonesia menjadi bagian penting dalam festival seni terbesar di dunia itu karena menjadi negara tamu. Karena disaksikan oleh jutaan mata dari seluruh Eropa dan dunia, ini menjadi kesempatan emas menampilkan dan memperkenalkan seluruh budaya Indonesia.

Sementara itu pada rubrik **Resensi Buku**, *JENDELA* menyajikan resensi mengenai buku bertema pendidikan karakter, yaitu "Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar & Implementasi". Melengkapi edisi XVIII ini kami sajikan pula rubrik **Kajian** yang merupakan pandangan pengamat pendidikan, Doni Koesoema, berjudul "Revolusi Mental Pendidikan". Tulisan ini secara garis besar mengulas tentang Perpres PPK. Dalam tulisannya, Doni percaya PPK menjadi salah satu tonggak penting yang bisa mentransformasi pendidikan nasional menjadi lebih baik.

Tak ketinggalan, di penghujung halaman *JENDELA*, tersuguh rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia** yang menghadirkan artikel ringan tentang bahasa Indonesia. Kami berharap seluruh sajian rubrik yang kami suguhkan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Selamat membaca.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

Penanggung Jawab: Ari Santoso

Pemimpin Redaksi: Luluk Budiyo

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick,
Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Prima Sari,
Dwi Retnawati, Ryka Hapsari Putri

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



- Kemendikbud.go.id
- [Kemendikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemendikbud.RI)
- [@kemendikbud_RI](https://twitter.com/kemendikbud_RI)
- [KEMENDIKBUD.RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD.RI)
- [Kemendikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemendikbud.RI)
- jendela.kemendikbud.go.id

Salam Pak Menteri

Alhamdulillah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dengan ditandatanganinya perpres ini, maka cakupan PPK semakin luas. PPK tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) semata. PPK dilaksanakan bersama melalui pelibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Inilah yang dinamakan tripusat pendidikan.

Tidak hanya sekolah formal, peraturan ini juga mengamanatkan bahwa PPK diselenggarakan pada sekolah nonformal dan informal. Bukan hanya Kemendikbud, tetapi juga Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dengan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang turut dalam pelaksanaan PPK. Kita bersyukur, upaya untuk membentuk karakter kepada Generasi Emas 2045 ini didukung semua pihak dan ikut bersama-sama menyukseskan pelaksanaan PPK ini.

Kemendikbud sendiri pertama kali menyelenggarakan PPK pada 2016. Saat itu sebanyak 542 sekolah tergabung menjadi sekolah percontohan penerapan PPK. Tahun 2017, Kemendikbud menargetkan sebanyak 1.626 sekolah yang menjadi rintisan PPK. Diharapkan dari target tersebut dapat memberikan dampak pada sekitar 9.830 sekolah di sekitarnya. Kemendikbud menargetkan hingga 2020 implementasi penuh PPK dapat terwujud. Semoga.

Kita percaya, pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Karena pada hakekatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik.

Maka, peran guru di sini menjadi amat penting. Guru merupakan aktor utama yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam implementasi PPK. Peran guru harus sebagai tutor, *resource linkers*, *gate keepers*, fasilitator, dan katalisator. Tidak hanya itu, PPK juga merevitalisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan ekosistem pendidikan melalui perluasan pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah. Itulah mengapa penyelenggaraan PPK dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.



Kita percaya, pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Tidak hanya di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial.



Dengan PPK, kita berharap bangsa kita punya pandangan masa depan yang positif. Melalui PPK, pemerintah menguatkan karakter generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21. Selain lima nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, melalui PPK, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda.

Mari kita bersama-sama melaksanakan ikhtiar ini dengan baik. Dengan sinergi dan kolaborasi yang

baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan generasi muda penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Secara konstitusional mendidik adalah tanggung jawab negara, tetapi perlu kita sadari bersama bahwa secara moral merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya pemerintah tentu memiliki keterbatasan, oleh karena itu saya mengajak kepada semua pihak untuk ikut mewujudkan cita-cita bangsa. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam melaksanakan pelaksanaan PPK dengan baik. (*)

Perjalanan PPK Sejak 2016 Hingga 2017

Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Pada hakikatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Dalam rangka mempersiapkan Generasi Emas 2045, pemerintah menguatkan karakter generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21. Selain lima nilai utama karakter, melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), pemerintah mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda.

Pada tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai melakukan kajian awal mengenai konsep PPK. Tim perumus PPK kemudian melakukan diskusi kelompok terpumpun dan memulai penyusunan konsep PPK. Setelah konsep PPK disusun, sambil melakukan pengembangan konsep, dilakukan pemetaan dan penetapan sekolah uji coba yang akan menerapkan PPK. Kemendikbud juga melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, serta finalisasi dokumen PPK.

Sebanyak 542 sekolah (SD dan SMP) telah tergabung menjadi sekolah percontohan penerapan program PPK di tahun 2016. Uji coba tahap I dilakukan di 42 sekolah, sedangkan uji coba tahap II dilakukan di 500 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah

yang telah menerapkan berbagai praktik baik pendidikan karakter sehingga diharapkan mampu menjadi contoh atau teladan, dan menularkan “virus kebaikan” dalam penerapan PPK di lingkungan sekitarnya. Sekolah-sekolah yang dipilih juga ditentukan berdasarkan keterwakilan provinsi, kondisi geografis, maupun status sekolah negeri dan swasta. Dalam uji coba tersebut dilakukan supervisi dan pendampingan, serta evaluasi uji coba PPK.

Pada tahun 2017, Kemendikbud telah menyelenggarakan banyak pelatihan terkait penerapan PPK. Pelatihan tersebut antara lain Pelatihan Calon Fasilitator PPK, Bimbingan Teknis Program PPK Bagi Kepala Sekolah, Pelatihan Guru Program PPK, Bimbingan Teknis Gerakan Literasi Sekolah, dan Penumbuhan Budi Pekerti Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Semua kegiatan pelatihan tersebut dilakukan dengan saling bekerja sama antarunit utama di lingkungan Kemendikbud.

Implementasi program PPK dilaksanakan secara bertahap. Di tahun 2017, Kemendikbud menerapkan implementasi mandiri dan bertahap dengan menargetkan sebanyak 1.626 sekolah sebagai target rintisan PPK. Diharapkan, sekolah-sekolah tersebut akan memberikan dampak pada sekitar 9.830 sekolah di sekitarnya. Implementasi PPK itu tentu saja menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan sekolah. Diharapkan, keberhasilan satuan pendidikan yang menjalankan PPK dapat menjadi teladan/inspirasi bagi seluruh satuan pendidikan lainnya. (*)



Terbentuk Karakter Bangsa yang Kuat,

Harapan Presiden Menyongsong Generasi Emas 2045

Menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu sejajar dengan negara maju lainnya adalah dambaan setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu upaya membangun bangsa yang besar itu adalah dengan membekali generasi muda dengan karakter kuat. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap penguatan karakter generasi penerus bangsa ini. Pada 6 September 2017, Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap penguatan karakter bangsa begitu besar. Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo terus menggemakan revolusi mental dan semangat ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Di bidang pendidikan, gerakan ini diterjemahkan melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan di Indonesia.

Presiden menilai, pendidikan karakter sangat penting dalam upaya membangun kualitas individu para calon generasi. Pendidikan karakter akan menjadi jawaban atas dinamika perubahan masa depan sekaligus memberi bekal keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Karakter yang kuat membentuk individu menjadi pelaku perubahan bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Pada hakekatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik.

Pendidikan karakter memang sudah dilaksanakan di sejumlah sekolah di Indonesia. Namun, perlu dilakukan upaya terobosan agar pendidikan karakter bisa dilaksanakan secara konsisten oleh sekolah dan memberikan dampak yang nyata. Untuk itulah PPK dilaksanakan pada satuan pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal.

Dengan PPK, siswa bisa memiliki karakter kuat, seperti berpikir kritis

dan menyelesaikan masalah, kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama atau berkolaborasi sehingga mampu berdaya saing dengan kompetensi abad 21. Penguatan karakter siswa juga diharapkan dapat membentuk siswa untuk memiliki lima karakter utama yaitu religius, integritas, nasionalis, gotong royong, dan mandiri.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan pihak-pihak lain yang terlibat menjadi punya landasan hukum dalam melaksanakan PPK di daerah ataupun wilayahnya masing-masing. Presiden berharap peraturan tersebut mampu memberikan dasar yang kuat bagi generasi muda agar terbentengi dari intervensi negatif budaya luar.

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran PPK dilakukan terintegrasi di dalam dan luar sekolah dengan pengawasan guru. Berbagai pemangku kepentingan yang ada pada ekosistem pendidikan tersebut ikut serta dan bersama-sama bertanggung jawab, bersinergi dalam pembentukan karakter yang menjadi modal dasar untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan memiliki jati diri bangsa di masa mendatang. Tidak hanya sekolah, keluarga dan masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan PPK. Implementasi PPK juga dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Selain itu, PPK juga dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Artinya, pelaksanaan PPK dapat dilakukan di dalam dan di luar ruang kelas, serta tidak melulu dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah. (*)

“Pendidikan karakter akan menjadi jawaban atas dinamika perubahan masa depan sekaligus memberi bekal keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21.”

Pendidikan Karakter, Jiwa Utama dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia

Awal September 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perpres ini merupakan langkah terobosan menuju restorasi pendidikan nasional dan reformasi sekolah melalui Gerakan PPK. Ini menjadi haluan yang tepat untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 dalam menghadapi dinamika perubahan di masa depan.



Foto: Dok. Lomba Foto Pendidikan Kemendikbud

Perpres yang memuat enam bab dan 18 pasal ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan, pelaksana, serta tanggung jawab pelaksana PPK.

Revolusi mental menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program prioritas yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Karakter bangsa yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas adalah nilai-nilai yang ingin dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia ke depan. Dengan karakter bangsa yang kuat maka diharapkan Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Perpres yang memuat enam bab dan 18 pasal ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan, pelaksana, serta tanggung jawab pelaksana PPK. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab sekolah untuk memperkuat karakter siswa. Hal ini dilakukan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan PPK ini. Tujuan tersebut adalah membangun dan membekali siswa dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan, serta

merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi seluruh warga sekolah.

Dalam Perpres ini dijelaskan bahwa ruang lingkup pelaksanaan PPK tidak hanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal semata. PPK juga diselenggarakan oleh sekolah pada jalur pendidikan nonformal dan informal. Jadi, bukan hanya sekolah formal, satuan pendidikan nonformal dan informal, seperti lembaga kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar belajar, dan sekolah rumah (*home schooling*) juga menyelenggarakan PPK. Semua pihak diajak turut terlibat dalam pelaksanaan PPK ini.

Pada jalur pendidikan formal, penyelenggaraan PPK dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. PPK bisa dilakukan di dalam dan/atau luar lingkungan sekolah, serta dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah dan guru bertanggung jawab atas pelaksanaan PPK di sekolah. Sementara pada jalur pendidikan nonformal, penyelenggaraan PPK dapat dilaksanakan melalui satuan pendidikan



nonformal berbasis keagamaan dan satuan pendidikan nonformal lainnya. Pada jalur pendidikan informal, pelaksanaan PPK dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Tanggung Jawab Lintas Kementerian

Besarnya harapan yang ingin dicapai melalui PPK, gerakan pendidikan ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Para menteri pada kementerian tersebut diberikan tanggung jawab masing-masing untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan PPK. Pemerintah daerah juga diberikan tanggung jawab melaksanakan PPK sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Perpres ini juga disebutkan kewajiban sekolah untuk melaksanakan PPK sesuai dengan yang ditetapkan

dalam peraturan ini. Sementara itu bagi sekolah yang sudah melaksanakan PPK melalui lima hari sekolah dapat terus dilanjutkan, namun tetap menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Perpres tersebut.

Presiden Joko Widodo menuturkan agar gerakan ini didukung semua pihak, termasuk pemerintah daerah. "Ini memberikan payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan wali kota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter, baik di madrasa, sekolah, dan di masyarakat," ujarnya. (*)

Bukan hanya sekolah formal, satuan pendidikan nonformal dan informal, seperti lembaga kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar belajar, dan sekolah rumah (home schooling) juga menyelenggarakan PPK.



Lima atau Enam Hari, Sekolah yang Menentukan

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diselenggarakan oleh sekolah dengan melibatkan tanggung jawab keluarga atau orangtua dan masyarakat. Sekolah bersama komite diberikan kebebasan menetapkan pelaksanaan PPK selama lima atau enam hari sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat lebih leluasa mengatur pelaksanaan PPK sesuai dengan kondisi serta kebijakan masing-masing sekolah.



Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter memberi keleluasaan bagi sekolah melaksanakan gerakan pendidikan tersebut selama lima atau enam hari sekolah dalam satu minggu. Ketentuan pelaksanaan hari sekolah diserahkan pada masing-masing sekolah bersama komite yang dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Bagi sekolah yang menetapkan pelaksanaan pendidikan formal selama lima hari dalam satu minggu, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Pertimbangan itu di antaranya, sekolah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PPK, mampu memanfaatkan kearifan lokal setempat, serta menerima masukan dari pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Kearifan lokal dan pemberdayaan keunggulan lokal masuk sebagai komponen penerapan PPK. Di sini sekolah dapat melibatkan tokoh masyarakat, seniman atau budayawan lokal.

Karena guru menjadi aktor utama dalam pelaksanaan PPK, maka sekolah perlu mempertimbangkan pelaksanaan hari sekolah dengan melihat kecukupan jumlah guru dengan jumlah siswa yang ada. Sekolah juga harus mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana pendukung sehingga tidak menghambat pelaksanaan PPK yang diselenggarakan selama hari sekolah.

Implementasi PPK merupakan kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Karena itulah, kearifan lokal dan pemberdayaan keunggulan lokal masuk sebagai komponen penerapan PPK. Di sini sekolah dapat melibatkan tokoh masyarakat, seniman atau budayawan lokal. Ini juga menjadi wujud keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PPK. "Jiwa gotong royong di sekolah harus lebih ditingkatkan lagi. Sekolah dapat tumbuh dengan keunggulan masing-masing," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.

Penyelenggaraan PPK dilakukan terintegrasi dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaannya, implementasi PPK menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan formal dan guru. Tanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru ini dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala satuan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPK pada Jalur Nonformal dan Informal

Pada jalur nonformal, implementasi PPK dilakukan melalui satuan pendidikan nonformal berbasis keagamaan dan satuan pendidikan nonformal lainnya. Jenis implementasi ini menekankan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan implementasi PPK di jalur pendidikan informal dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan masyarakat dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh paling sederhana kegiatan di lingkungan keluarga yang dapat ditiru dalam pelaksanaan PPK adalah menghabiskan waktu berkualitas antara orangtua dan anak.

Dikutip dari laman sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id, psikolog dari Yayasan Praktek Psikologi Indonesia (YPPI), Elizabeth Santosa memaparkan kaitan antara anak yang bahagia dengan kecerdasan sosial dan emosional yang dimiliki serta dampak ketika mereka dewasa.

Menurut psikolog yang juga komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini, anak-anak yang bahagia memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial serta kemampuan sosial dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Semua sifat ini, lanjutnya, dapat mempengaruhi berbagai aspek di masa depan serta keberhasilan pendidikan, kesuksesan karier, dan lainnya, termasuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kebahagiaan anak antara lain dipengaruhi oleh interaksi sosial positif yang melibatkan anggota keluarga. Karenanya, penting bagi orang tua untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak.

"Dengan menghabiskan waktu bersama, orang tua juga akan semakin mengenal anak dan diri sendiri secara lebih baik," ujar Elizabeth. Dengan mengetahui apa yang membuat dirinya bahagia, lanjutnya, ayah dan ibu bisa menjadi orang tua yang bahagia. Sehingga bisa menularkan kebahagiaannya kepada pasangan dan anak, yang pada akhirnya mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal dan menjadi anak yang bahagia. Faktor lain yang dapat menunjang kebahagiaan anak, kata Elizabeth, adalah kondisi kesehatan serta punya kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya, baik melalui seni, hobi, pekerjaan, ataupun minat pribadi lainnya. (*)

Guru, Aktor Utama Pelaksanaan PPK

PPK Mengembalikan Jati Diri Guru sebagai Pendidik

Sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara, “ing ngarso sung tuladho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani”, maka seorang guru idealnya memiliki kedekatan dengan anak didiknya. Tidak hanya perkembangan dimensi intelektualitas, namun juga perkembangan kepribadian setiap anak didiknya. Karena itulah melalui kegiatan penguatan pendidikan karakter (PPK), guru memiliki lima peran utama, yaitu sebagai pengajar (tutor), penghubung (resource linkers), penjaga gawang (gate keepers), fasilitator, dan katalisator.

Kunci kesuksesan pendidikan karakter terletak pada peran guru. Peran guru sangat penting dalam pendidikan karakter. Guru harus menjadi sosok yang mencerahkan, membuka alam pikir serta jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keteladanan, perilaku, moralitas, dan nilai-nilai kebinekaan. Pendidikan karakter sejatinya menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya.

Ada lima peran utama guru dalam penguatan pendidikan karakter, yakni sebagai pengajar atau tutor, penghubung (*resource linkers*), penjaga gawang (*gate keepers*), fasilitator, dan katalisator.

Guru adalah pengajar atau tutor mata pelajaran yang harus mampu menyampaikan mata pelajaran agar dimengerti dan dipahami anak didik. Guru juga harus mampu berperan sebagai **penghubung** anak didik dengan berbagai sumber-sumber belajar yang beragam, yang tidak hanya ada di dalam kelas atau sekolah, namun juga di luar sekolah. Guru juga harus mampu bertindak sebagai **penjaga gawang** yang membantu anak didik

menyaring berbagai pengaruh negatif yang berdampak tidak baik bagi perkembangannya. Guru juga harus bisa berperan sebagai **fasilitator** yang membantu anak didik mencapai target pembelajaran. Kemudian terakhir sebagai **katalisator**, guru juga harus mampu menggali dan mengoptimalkan potensi setiap anak didik.

Saat ini, melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 menjadi PP Nomor 19 Tahun 2017, Kemendikbud mendorong perubahan paradigma para guru agar mampu melaksanakan perannya sebagai pendidik profesional yang tidak hanya mampu mencerdaskan anak didik, namun juga membentuk karakter positif mereka agar menjadi generasi emas Indonesia dengan kecakapan abad ke-21. Berdasarkan pasal 15 PP Nomor 19 Tahun 2017, pemenuhan beban kerja guru dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan. Kegiatan lain di luar kelas dalam upaya penguatan pendidikan karakter juga dapat dikonversi ke jam tatap muka. Contoh Kreativitas Guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter Guru diharapkan memiliki kemampuan berkreasi dalam menciptakan



kegiatan yang mendukung penguatan pendidikan karakter. Berbagai kegiatan di dalam maupun di luar kelas bisa diciptakan guru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan PPK. Misalnya dalam mengenalkan nilai-nilai nasionalisme, guru bisa membawa siswa ke museum. Di museum, guru bisa memperkenalkan sejarah, benda-benda pusaka, atau budaya Indonesia secara langsung, tidak hanya melalui foto yang biasanya terjadi di dalam kelas. Penerapan PPK di sekolah memberikan ruang kepada guru untuk berkreasi.

Kreativitas guru dalam membuat berbagai kegiatan PPK juga tidak terbatas pada mata pelajaran yang diampunya. Guru Bahasa Indonesia, misalnya, bisa saja mengajarkan siswa bagaimana cara bercocok tanam yang baik, karena ia hobi dan ahli bercocok tanam. Dalam hal ini, guru SD memiliki kelebihan dalam ruang berkreasi, karena pola belajar mengajar di SD berdasarkan Kurikulum 2013 adalah tematik.

Contoh sederhana lain, guru juga bisa memanggil tukang cilok ke yang kerap berjualan di depan sekolah untuk menjadi sumber belajar di kelas. Siswa bisa belajar kemandirian dan

kewirausahaan dari tukang cilok yang akan berbagi pengalaman mengenai persiapan berdagang, penjualan, hingga menghitung hasil, dan bagaimana dia bisa bertahan hidup dari berjualan cilok.

Bagi sekolah yang berada di daerah, guru bisa saja membawa siswa ke lingkungan alam seperti hutan. Di sana siswa bisa ditugaskan untuk mempelajari jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang terdapat di hutan. Guru tidak perlu tidak terpaku pada pembagian antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekolah dan guru bisa lebih bebas berkreasi menciptakan kegiatan dalam proses belajar-mengajar. Banyak hal yang bisa diciptakan guru untuk kegiatan PPK sesuai kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Semua bentuk kegiatan itu pun bisa disesuaikan dengan lima nilai utama karakter prioritas dalam PPK, yaitu religius, nasionalis, integritas, gotong-royong, dan mandiri. (*)

Praktik-praktik Baik Program PPK Ini Tak Ubah Kurikulum Di Sekolah

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) hadir tidak untuk mengubah struktur kurikulum yang sudah berjalan di setiap sekolah baik yang menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah juga tidak perlu menambah waktu kegiatan belajar mengajar di kelas di luar ketentuan kurikulum yang diterapkan tersebut. Sejumlah praktik baik dari sekolah-sekolah di bawah ini merupakan contoh penyelenggaraan program PPK yang tidak mengubah kurikulum di sekolah.

Program PPK mendorong sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Melalui program PPK, sekolah boleh mendesain budaya sekolah sesuai dengan kemampuan dan kearifan lokal di daerahnya sehingga menjadi ciri khas serta keunggulan sekolah itu sendiri.

“Sesuai arahan Presiden, saya ingin mengingatkan, bahwa sekolah kita harus berubah. Kalau ingin maju ya harus berubah. Dan berubahnya harus cepat, karena ketertinggalan kita dengan negara-negara lain sudah jauh,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Aula Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta pada suatu waktu.

Dalam menerapkan program PPK, sekolah diberikan kebebasan

melibatkan orangtua, komite sekolah, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Misalnya saja seperti yang dilakukan SMA Negeri 15 Kota Semarang, Jawa Tengah, orangtua dapat mengajar para siswa di kelas melalui Program Orangtua Mengajar. Hal ini dilakukan untuk memotivasi siswa dalam merancang masa depannya seperti yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013.

Hadi Ibrahim Soleh, orangtua Nabila, siswa kelas XII SMA Negeri 15 Kota Semarang, menjadi salah satu pengajar dalam program sekolah tersebut. Dia menuturkan pengalamannya menjadi pengusaha ekspor-impor sejak awal hingga sukses seperti saat ini kepada para siswa. Hal itu dilakukan agar memotivasi siswa untuk berwirausaha setelah lulus sekolah kelak, terlebih lagi jika mereka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Hadi mengatakan, siswa memiliki peluang usaha kecil untuk membiayai sekolah, seperti berjualan baju, berjualan gorengan, dan lainnya. “Kalau mau sukses, ya, harus mau berusaha dan berjuang, dimulai dari yang kecil. Tidak ada ceritanya orang tiba-tiba langsung jadi bos besar,” katanya seperti dikutip dari laman cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id.

Hadi juga menjelaskan bahwa cita-cita anak harus disesuaikan dengan bakat dan potensi yang dimiliki seorang anak tersebut. Menanamkan semangat untuk menjadi diri sendiri kepada anak, kata dia, penting bagi orangtua dan sudah menjadi tugas orangtua untuk membimbing anak, termasuk jika mereka ingin belajar mandiri menjadi pengusaha.

Galih Endah Mukti, siswa XII IPA 2 SMA Negeri 15 Kota Semarang, mengaku Program Orngtua Mengajar di sekolahnya memberikan motivasi untuk menjadi orang sukses di kemudian hari. Terlebih lagi setelah dia mendengar pengalaman salah satu orangtua siswa itu. “Memang sukses itu tidak mudah, harus berani mengawali dari sesuatu yang kecil. Namun, yang paling penting adalah selalu ingat kepada Allah SWT di manapun berada,” ujarinya.

Program Orngtua Mengajar di SMA Negeri 15 Kota Semarang merupakan salah satu turunan dari Program PPK di mana orangtua terlibat langsung dalam proses pendidikan siswa di sekolah. Orngtua juga diajak untuk lebih memperhatikan tanggung jawab pendidikan anaknya terutama dalam hal pendidikan karakter. Program seperti ini dapat ditiru dan dikembangkan juga di sekolah-sekolah lain. (*)

Nilai Utama Karakter Religius

- Kegiatan tausiyah dan dai yang dilakukan oleh siswa
- Pendidikan wushta (hafal 30 juz alquran)
- Sholat berjamaah setiap zuhur dan ashar
- Absen shalat (guru mengingatkan siswa untuk shalat melalui whatsapp ketika berada di rumah)
- Membaca Al-Quran 40 menit sebelum masuk kelas
- Adanya kegiatan malam bimbingan iman dan taqwa

Sumber: Hasil Monitoring dan Evaluasi PPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017



Praktik Baik PPK

Budayakan Literasi Sekolah Melalui Ban Bekas

Selain menumbuhkan dan memperkuat karakter siswa, Program PPK juga mendorong peningkatan kemampuan literasi peserta didik di sekolah. Sekolah juga diperbolehkan memfasilitasi kegiatan literasi bagi siswa dan warga sekolah lainnya selama sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini telah dilakukan oleh SMA Negeri 11 Kota Jambi yang menyediakan meja dan kursi literasi serta beberapa koleksi buku di sudut-sudut sekolah.

Uniknya, kursi-kursi literasi ini dibuat oleh para siswa dari ban bekas dan tidak sembarang orang dapat mendudukinya. Kursi-kursi itu diberi penanda “Dilarang Duduk Kecuali Literasi” sehingga hanya orang yang hendak membaca saja yang dapat menggunakannya. Tak sungkan teguran akan diberikan oleh siapapun warga sekolah yang melihat kursi tersebut digunakan hanya untuk mengobrol atau sekadar bersantai saja oleh seseorang atau lebih.

Dalam membuat meja dan kursi literasi tersebut, para siswa SMA Negeri 11 Kota Jambi juga diajak untuk berkreasi mengolah ban bekas menjadi barang yang berguna, bahkan memiliki nilai jual di masyarakat. Bahan baku ban bekas pun didapat mereka dari lingkungan sekitarnya yang kemudian dimanfaatkan sehingga semangat berkreasi siswa terus berkembang.

“Memang kami arahkan (siswa) menggunakan barang bekas agar dapat menekan biaya (biaya produksi,-),” ujar guru pendidikan kewirausahaan SMA Negeri 11 Kota Jambi, Swit Hermita Irianti, saat diwawancarai. Sepintas tak tampak meja dan kursi literasi itu terbuat dari ban bekas. Namun, dengan balutan kain bermotif yang menarik mampu memberikan kesan

Contoh Praktik Baik Nilai Utama Karakter Nasionalisme

Menyanyikan lagu nasional sebelum dan sesudah sekolah

Memutar lagu nasional di lingkungan sekolah

Ekstrakurikuler tari tradisional

Membeli alat musik khas daerah setempat

Javanese Day (setiap hari kamis)

Sumber: Hasil Monitoring dan Evaluasi PPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

cantik pada meja dan kursi tersebut. Bahkan, rasa malas dari kursi saat diduduki tidak kalah empuk dengan sofa-sofa yang dijual di toko mebel pada umumnya.

Selain membuat meja dan kursi dari ban bekas, para siswa SMA Negeri 11 Kota Jambi juga mampu membuat karya lain. Misalnya, pot bunga dari ban bekas, tempat tisu dari kain perca, wadah air mineral gelas yang terbuat dari plastik atau kemasan suatu produk, dan lainnya.

Kegiatan literasi di SMA Negeri 11 Kota Jambi pun terus digalakan, seperti melalui kegiatan siswa membaca buku non pelajaran selama 20 menit sebelum memulai kegiatan belajar di kelas. Para siswa dapat menggunakan buku yang disediakan oleh sekolah maupun buku yang telah dibawanya dari rumah. (*)



Praktik Baik PPK

Bantu Kurangi Sampah Plastik, Sekolah Ini Juga Tanamkan Kejujuran

Lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan rapi, serta tertib akan tampak jika kita berkunjung ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santa Ursula Kota Bandung, Jawa Barat. Menariknya, kita tidak akan menemui botol air mineral plastik di sekolah ini. Budaya sehat yang digalakan sekolah itu salah satunya memang melarang warga sekolah membawa botol air mineral plastik di lingkungan sekolah.

SMP Santa Ursula Kota Bandung memberlakukan peraturan tersebut semata-mata untuk berkontribusi mengurangi sampah plastik khususnya di lingkungan sekolah. Dengan peraturan itu, secara tidak langsung juga mengurangi dampak pemanasan global. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik sulit terurai oleh tanah dan membutuhkan waktu yang sangat lama, perlu waktu 500 hingga 1.000 tahun untuk menguraikannya. Tak heran sekolah yang bangunannya merupakan cagar budaya ini mampu meraih peringkat ke-1 Sekolah Sehat Tingkat Kota Bandung Tahun 2014/2015 lalu.

Warga sekolah pun baik siswa, guru, kepala sekolah, dan lainnya mau tidak mau membawa botol air minum dari rumah masing-masing. Tetapi sekolah menyediakan galon air minum di sudut-sudut ruang sekolah bagi warga sekolah. Namun, ada hal menarik kala setiap orang hendak mengambil air minum dari galon-galon tersebut, terdapat kotak 'kejujuran' di samping galon yang berfungsi untuk menaruh uang. Tidak ada aturan nominal minimal bagi setiap orang yang mengambil air dari galon tersebut, sepenuhnya bergantung keikhlasan masing-masing.

Kedua hal menarik itu merupakan pendidikan karakter yang didesain sekolah bagi warga SMP Santa Ursula Kota Bandung. Menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan serta menumbuhkan kejujuran adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang coba ditumbuhkan oleh sekolah. Kedua langkah itu pun memang terlihat sederhana tetapi akan berdampak besar bagi siswa-siswa SMP Santa Ursula Kota Bandung di masa mendatang. Membangun kesadaran lingkungan dan kejujuran pada siswa merupakan hal fundamental untuk membangun bangsa ini kelak. (*)



Contoh Praktik Baik Nilai Utama Karakter Mandiri

Adanya pojok baca/literasi

Adanya branding sekolah (contoh : SPENSMART dan BRAINPLUS RELIGIUS)

Berberis di depan sebelum masuk kelas

Merapikan baju sebelum masuk kelas

Merapikan sepatu sebelum masuk kelas

Adanya jadwal menggunting kuku bersama

Adanya jadwal menggosok gigi bersama

Adanya ekstrakurikuler polisi cilik

Dipilihnya duta perpustakaan

Sumber: Hasil Monitoring dan Evaluasi PPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Praktik Baik PPK

Senyum, Sapa, dan Salam, Langkah Sederhana Tumbuhkan Karakter Siswa

Sebelum jam sekolah tiba, tak sedikit anak yang tidak mau berangkat ke sekolah terlebih lagi pada anak-anak di jenjang Sekolah Dasar (SD) khususnya kelas I hingga kelas III. Terkadang anak-anak sampai tantrum dengan berbagai alasan dan kemauan mereka masing-masing. Dalam hal ini, orangtua dan guru perlu bekerja sama agar anak mau bersekolah. Salah satunya, ketika di rumah orangtua perlu membujuk anaknya hingga memberikan rasa nyaman kepada anak agar mereka mau bersekolah.

Tak sampai di situ saja, ketika anak tiba di sekolah, guru sebagai pengganti orangtua di sekolah pun juga harus memberikan rasa nyaman kepada anak dan membuat orangtua percaya untuk menitipkan anaknya di sekolah. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan seorang guru adalah dengan memberikan senyum, sapa, dan salam saat anak-anak dan para orangtua tiba di sekolah. Hal inilah yang dilakukan guru-guru SD Negeri Inpress 7/83 Girian Weru Dua Bitung, Sulawesi Utara, setiap hari untuk memotivasi semangat dan energi belajar siswanya di sekolah.

“Mereka akan menjadi ceria kembali apabila disambut dengan senyuman dan sapaan,” ujar Maria, guru SD Negeri Inpress 7/83 Girian Weru Dua Bitung, Sulawesi Utara, pada suatu waktu.

Ketika berada di sekolah pun, baik guru atau murid di salah satu sekolah percontohan Program PPK itu saling memberikan senyum dan bertegur sapa saat berpapasan. Dalam hal ini, sekolah mencoba menumbuhkan nilai kesopanan dan kesantunan kepada siswa-siswanya. Pembiasaan senyum, sapa, dan salam di sekolah ini memang terlihat sederhana tetapi kelak di kemudian hari akan memberikan dampak besar bagi para siswa tentang sopan santun di kehidupan bermasyarakat.

Di SD Negeri Inpress 7/83 Girian Weru Dua Bitung juga menawarkan ekstrakurikuler polisi cilik bagi siswa-siswanya. Melalui ekstrakurikuler ini sekolah ingin menanamkan nilai karakter nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Keterlibatan pemangku kepentingan di bidang pendidikan juga dilakukan melalui kerja sama dengan Polisi Resor Bitung, Sulawesi Utara, untuk melatih dan mendidik para siswa dalam ekstrakurikuler tersebut sejak 2012.

Selain ekstrakurikuler polisi cilik, terdapat ekstrakurikuler dokter cilik, pramuka, dan tarian Maengket di SD Negeri Inpress 7/83 Girian Weru Dua Bitung sebagai pilihan. Siswa diperbolehkan memilih ekstrakurikuler tersebut sesuai minatnya. Pada intinya, ragam ekstrakurikuler tersebut mawadahi nilai-nilai karakter dalam Program PPK melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan tanpa mengubah kurikulum yang telah diterapkandi sekolah tersebut. (*)



Contoh Praktik Baik Nilai Utama Karakter Gotong Royong

Terbentuknya paguyuban orangtua per kelas

Adanya pelibatan warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam kegiatan-kegiatan sekolah

Koordinasi dengan kantin untuk mewujudkan kantin sehat

Adanya jadwal piket mengambil buku pelajaran di perpustakaan

Penerapan kebijakan siswa membawa bekal yang disiapkan oleh orangtuanya dari rumah.

Dukungan orangtua dalam melengkapi sarana prasarana di sekolah (contoh: AC dan air minum)

Anak diajarkan cara menabung oleh pihak bank yang datang ke sekolah

Kunjungan wali kelas ke rumah siswa

Sumber: Hasil Monitoring dan Evaluasi PPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Contoh Praktik Baik Nilai Utama Karakter Integritas

Buku kontrol siswa

Kantin kejujuran

Teknologi *fingerprint*

Jam kejujuran siswa

Sumber: Hasil Monitoring dan Evaluasi PPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Kini anda dapat mengakses Majalah Jendela melalui:

jendela.kemdikbud.go.id



Dapat diakses melalui PC, laptop, *smartphone*

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ditandatangani Presiden pada **6 September 2017**

Berisi:

6
Bab

18
Pasal

Pengertian:

Gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab **satuan pendidikan** untuk **memperkuat karakter siswa**.

PPK dilakukan melalui harmonisasi:

Yang terintegrasi dalam kegiatan **intrakurikuler**, **kokurikuler**, dan **ekstrakurikuler**.



Olah rasa



Olah pikir



Olah raga

Intrakurikuler

Penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kokurikuler

Penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

ekstrakurikuler

Penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal, meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Beberapa Substansi Isi Perpres:



3 prinsip PPK:

- 1 **Berorientasi** pada berkembangnya **potensi peserta didik** secara menyeluruh dan terpadu;
- 2 **Keteladanan** dalam penyerapan **pendidikan karakter** pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- 3 Berlangsung melalui **pembiasaan** dan **sepanjang waktu** dalam **kehidupan sehari-hari.**



Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh **Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.**

PPK dilaksanakan oleh:

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Agama
- Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah

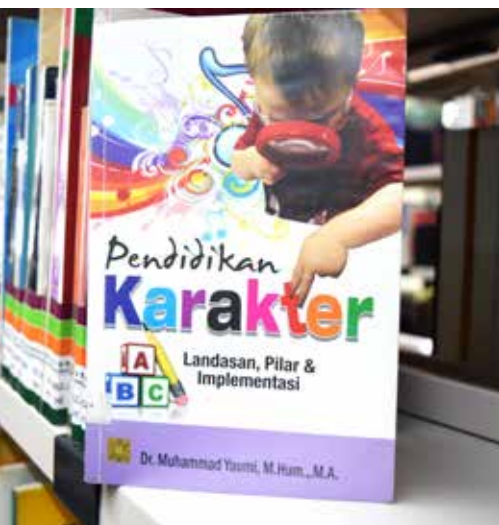
Pendanaan PPK bersumber dari:

- APBN
- APBD
- Masyarakat
- Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal Lain yang Penting:

- ✓ Sekolah diberikan jangka waktu paling lama 2 tahun harus dapat melaksanakan PPK.
- ✓ Sekolah yang telah menyelenggarakan PPK melalui 5 hari sekolah dapat terus berlangsung.

A-Z Pendidikan Karakter



Judul	: Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar & Implementasi
Penulis	: Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.
Penerbit	: Kencana
Tahun Terbit	: 2014
ISBN	: 978-602-1186-15-2
Jumlah halaman	: xxi + 226 hlm
Bentuk sampul	: Softcover
Bahasa	: Indonesia

Pendidikan karakter dipandang sebagai solusi cerdas dalam mengatasi persoalan bangsa. Ia tidak hanya sekedar menjadi wacana dan perbincangan di media massa dan forum-forum diskusi ilmiah, melainkan menjadi program yang telah terintegrasi dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan bahkan pada tingkat pendidikan tinggi.

Pendidikan karakter di Indonesia sudah lama dijalankan. Namun, belum ada rumusan tentang indikator-indikator yang jelas termasuk definisi, karakteristik, jenis, dan berbagai komponen yang membangun satu kesatuan utuh. Tidak ada pula petunjuk teknis yang paling efektif untuk dilakukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter.

Buku ini terbagi atas tiga bagian yang diawali dengan pembahasan mengenai berbagai konsep, teori, dan landasan utama upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pembahasan dilanjutkan dengan menyertakan empat landasan pendidikan karakter yang terdiri atas landasan psikologi, moral, etika, dan agama.

Pada bagian kedua, dijelaskan tentang pilar-pilar pendidikan karakter menurut *character counts* dan empat pilar pendidikan karakter di Indonesia yang meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Pada bagian ini, penulis juga memaparkan pengertian setiap nilai karakter dan budaya bangsa yang terdiri atas 18 nilai. Pengertian disertai dengan contoh perilaku yang mencerminkan nilai karakter tersebut.

Di bagian ketiga, penulis masuk pada pemaparan tentang bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Diawali dengan pentingnya pendidikan budaya dan karakter yang menjadi salah satu tawaran solusi untuk meminimalisasi dangkalnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pada bagian ini, penulis menawarkan penerapan pendidikan budaya dan karakter melalui transdisiplinaritas, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mentransformasikan pengetahuan dari berbagai perspektif untuk menghasilkan pengetahuan baru. Dalam hubungannya dengan pendidikan budaya dan karakter yang bermuara pada pengembangan kecerdasan spiritualitas, transdisiplinaritas merupakan suatu pendekatan yang berupaya mentransformasi dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas ke dalam berbagai disiplin lainnya.

Buku ini dapat menjadi referensi tentang bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Penjelasan yang disampaikan penulis cukup komprehensif, sehingga para pembaca diharapkan memahami lebih mendalam tentang pendidikan karakter. Di bagian akhir buku ini, penulis menyertakan hasil kajian tentang implementasi pendidikan karakter di madrasah aliyah negeri (MAN). Kajian ini dilakukan di MAN Model Makassar dengan mengumpulkan 50 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengamati 26 informan, dan mewawancarai lima informan. (*)



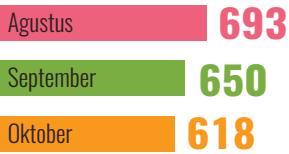
Statistik Perpustakaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Koleksi: **27.032** judul

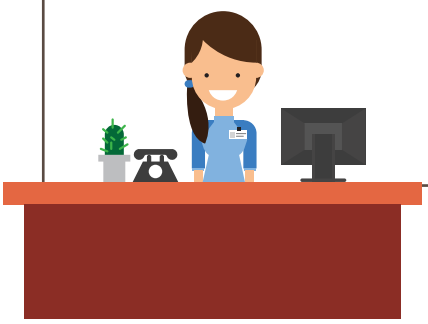
Periode Agustus – Oktober 2017

Koleksi yang dipinjam

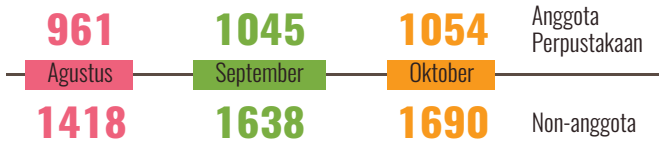


Koleksi yang dipinjam terdiri dari :

- ▀ Pendidikan
- ▀ Fiksi
- ▀ Bahasa Inggris
- ▀ Manajemen



Jumlah Pengunjung



Pendaftar Anggota Baru Perpustakaan



Laporan dari Festival Seni Europalia 2017

Kebudayaan Nasional Indonesia Menjadi Bintang Europalia 2017

Kebudayaan nasional Indonesia menjadi bintang dalam festival seni dan budaya Europalia tahun 2017. Setelah melalui seleksi, Indonesia terpilih sebagai negara tamu di festival seni budaya Europalia yang ke – 26. Indonesia terpilih menjadi negara keempat di Asia setelah Jepang (1989), Cina (2009), dan India (2013).

Festival seni Europalia dibuka pada tanggal 10 Oktober 2017 oleh Yang Dipertuan Agung Raja Belgia Philippe, Philippe Leopold Louis Marie dan Ratu Mathilde serta dihadiri Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Jusuf Kalla mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Festival Seni Budaya Europalia akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kaya seni dan budaya serta keragaman Bahasa dan adat istiadat.

Festival seni yang berlangsung selama empat bulan, mulai 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018. Dalam kegiatan tersebut Indonesia mengangkat tema *“Heritage, Contemporary, Creation, and Exchange”*. Sebagai negara tamu, Indonesia membawa agenda sebanyak 247 karya dan program kegiatan, antara lain 20 pameran, 71 pertunjukan tari dan teater, 95 pertunjukan musik, apresiasi 34 karya sastra, pemutaran 18 film, dan 9 konferensi.

Di bidang seni pertunjukan, Indonesia menghadirkan seniman tari dan seni pertunjukan seperti Darlene Litaay, Eko Supriyanto, Fitri Setyaningsih dan sebagainya. Selain pertunjukan seni tari, musik, dan teater tetapi juga akan memamerkan berbagai artefak yang menggambarkan sejarah kebudayaan Indonesia. Kurang lebih ada 400 artefak yang dipinjam dari Museum Nasional, museum di daerah, hingga koleksi

pribadi. Selain itu juga memamerkan arsip dan karya seni rupa di dalam pameran *“Power and Other Things”*.

Pameran *“Power and Other Things”* berlangsung pada tanggal 17 Oktober sampai 21 Januari 2018 di Galeri Seni Bozar, Brussels, Belgia. Dalam pameran ini, Indonesia menampilkan seni rupa mulai dari periode 1835 hingga sekarang dengan menghadirkan 21 perupa Indonesia salah satunya Raden Saleh.

Menurut Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadjamuddin Ramly mengatakan bahwa pameran *“Power and Other Things”* sebagai rangkaian Festival Seni Europalia menjadi penting untuk menampilkan karya para perupa Indonesia mulai dari modern hingga kontemporer. Menurutnya, isu yang diangkat menarik, yakni bagaimana perupa Indonesia baik yang modern maupun kontemporer memiliki porsi tawarnya masing-masing terhadap kolonialisme.

Pameran *“Ancestors and Rituals”* diselenggarakan di Bozar dengan menampilkan aneka artefak yang berasal dari zaman pra-sejarah; Hindu-Budha; dan Islam, kolonialisme dan kemerdekaan. Sedangkan pameran *“Archipel”* Indonesia menampilkan kebesaran budaya maritim yang diselenggarakan di La Boverie, Liege, Belgia. Pameran ini mencerminkan





Foto-foto: Feri Latief (Tim Fotografi Europalia Indonesia)



gugusan Nusantara yang disatukan oleh lautan, hubungan antarpulau terwujud dalam berbagai teknologi perkapalan, pengetahuan navigasi, serta aneka ragam tradisinya.

Dalam pameran *“Archipel”* Indonesia mempertunjukkan kemegahan maritimnya melalui kapal pinisi sepanjang 12 meter terpajang di ruang pameran Museum La Boverie, Liege. Menurut Nadjamudin Ramly, dengan hal tersebut ia berharap pinisi dapat terus lestari karena pinisi merupakan warisan budaya negeri ini yang perlu dilestarikan.

Tidak hanya itu, film karya anak bangsa juga diputar selama festival Europalia salah satunya film yang bertema perempuan seperti Perempuan Punya Cerita (Chants of Lotus). Selain itu komik karya Sheila Rooswita dan mural karya Yudha Sandy turut memeriahkan festival seni tersebut.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dengan mengikuti Festival Europalia menjadi ajang bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kekayaan budayanya meskipun diplomasi budaya kita sudah cukup berhasil.

“Keterlibatan Indonesia merupakan kesempatan baik untuk menyatakan kepada dunia tentang potensi Indonesia, termasuk kekuatan untuk hidup dalam keberagaman,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid. Hilmar menambahkan penyelenggaraan Europalia menargetkan tiga aspek kesuksesan, yakni sukses penyelenggaraan, promosi dan perolehan/manfaat. Menurutnya, keterlibatan Indonesia diharapkan memperkuat kembali kerja sama antara Indonesia dan berbagai pihak. (*)

Revolusi Mental Pendidikan

Oleh: **Doni Koesoema A**

Pemerhati Pendidikan

Revolusi mental jadi kata kunci bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mentransformasi bangsa Indonesia. Dalam bidang pendidikan, revolusi mental diperkuat melalui Perpres No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Implementasi perpres itu dan soal yang muncul perlu ditelaah lebih dalam.

Lima kemajuan

Ada lima kemajuan penting tentang penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam perpres ini. Pertama, PPK mengembalikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ke rumah pendidikan nasional. Perpres mendefinisikan PPK sebagai "... gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan keija sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental" (Pasal 1 Ayat 1).

Definisi ini secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab pengembangan PPK adalah satuan pendidikan. Penanggung jawab PPK di sekolah adalah kepala sekolah. Lebih dari itu, PPK juga dipahami dalam kerangka pembentukan manusia Indonesia yang lebih utuh dengan melibatkan harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Apabila harmonisasi ini terjadi, tentu kita berharap pendidikan kita akan melahirkan individu yang mampu mengembangkan seluruh potensi manusiawinya dalam keempat ranah pengolahan rasa yang menjadi basis penting dalam antropologi pendidikan.



Kolaborasi antara sekolah, rumah, dan masyarakat merefleksikan konsep tripusat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sekolah-rumah-masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang membuat dunia jadi datar, komunikasi terjadi lintas batas dan ketergantungan antara satu negara dan negara lain tak dapat diabaikan, PPK mengantisipasi dengan konsep terkini, yaitu membangun dan membekali peserta didik agar dapat menghadapi dinamika perubahan di masa depan (Pasal 2 poin a).

Kedua, tujuan PPK dideskripsikan dengan lebih jelas, yaitu membangun dan membekali peserta didik untuk menghadapi dinamika perubahan zaman di masa depan, menjadi platform pendidikan nasional dan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan, serta melakukan revitalisasi dan penguatan pelaku pendidikan.

Eksplisitasi tujuan PPK dalam Pasal 2 dapat membantu mengorientasikan satuan pendidikan untuk mengembangkan implementasi pendidikan secara utuh, seperti pembekalan peserta didik dengan keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menyelesaikan persoalan dan menciptakan inovasi baru. Sekolah juga perlu mengembangkan kemampuan berkomunikasi lisan ataupun tulisan, bekerja sama dalam membangun dunia yang lebih baik, penguatan peran guru dan orangtua/masyarakat dalam pendidikan, serta penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Ketiga, pembagian kewenangan. PPK yang menekankan keutuhan kolaborasi antara sekolah-rumah-masyarakat memerlukan definisi pelaksana dan tanggung jawab yang jelas lintas kementerian. Perpres tentang PPK membuka relasi antara sekolah dengan lembaga-lembaga dan komunitas lain, termasuk di dalamnya lembaga pemerintahan dan komunitas masyarakat madani dalam rangka penguatan karakter, sekaligus

memberikan batasan yang tegas tentang kewenangan kementerian untuk merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Artinya, dengan adanya perpres ini, setiap kementerian bertanggung jawab menerapkan dan mendukung PPK di lingkungan satuan kerja sesuai kewenangannya.

Pasal 13 yang berisi pembagian kewenangan dan tanggung jawab PPK perlu dipahami dalam kerangka tata kelola kelembagaan dan tertib administrasi dan anggaran. Ini agar anggaran-anggaran pendidikan yang tersebar di banyak kementerian dapat digunakan secara semestinya untuk mendukung implementasi PPK. Keempat, kebijakan hari sekolah. Meski PPK tak terkait langsung dengan kebijakan hari sekolah, tampaknya pemerintah merasa perlu mengatur dan menjelaskan tentang hari sekolah yang menjadi polemik dan perdebatan di masyarakat. Ketentuan hari sekolah akan diserahkan pada setiap satuan pendidikan. Yang sudah melaksanakan lima hari sekolah tetap berjalan sebagaimana adanya. Apabila ada sekolah yang ingin melaksanakan lima hari sekolah, sekolah perlu mempertimbangkan beberapa syarat, seperti kecukupan pendidik dan tenaga pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh masyarakat dan/tokoh agama di luar komite sekolah.

Kelima, PPK sebagai desain besar pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia. Dengan menyerahkan keseluruhan tanggung jawab pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Perpres tentang PPK menjadi bingkai dan desain besar pembangunan manusia Indonesia. Karena itu, setiap kementerian sebagai pelaksana PPK perlu secara sigap menanggapi perpres ini sebagai bagian penting pembentukan karakter bangsa.

Melalui pasal-pasal yang mendefinisikan siapa pelaksana dan cakupan





kewenangan dan tanggung jawab implementasi PPK (Bab 3), setiap kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, bertanggung jawab merumuskan kebijakan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal, melakukan koordinasi dan evaluasi, serta membangun kolaborasi lintas kementerian. Ini berarti, komunikasi intensif lintas kementerian sangat diperlukan agar tidak terjadi salah komunikasi dalam implementasi PPK.

Prioritas nilai

Lima kemajuan konsep dalam Perpres tentang PPK ini perlu kita apresiasi karena dapat melegakan semua pihak yang selama ini merasakan bahwa kepentingannya kurang terakomodasi. Namun, selain ada kemajuan konsep, saya juga melihat ada satu persoalan, yang meskipun tidak begitu substansial, bisa mengaburkan pelaksanaan PPK di lapangan, yaitu bahwa perpres ini minus prioritas nilai.

Sebagai bagian dari revolusi mental, perpres ini belum mampu menunjukkan apa prioritas nilai yang sebenarnya ingin direvolusi melalui lembaga

pendidikan. Bagian pertimbangan dan Pasal 3 dalam perpres yang berisi 18 nilai yang merupakan pengulangan dari konsep Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa yang sudah pernah dirilis pada 2010. Gemar membaca, yang masuk cakupan 18 nilai itu, menurut saya, bukan nilai, melainkan hobi. Dari pengalaman, implementasi 18 nilai ini sangat membingungkan, terlalu banyak dan tidak fokus. Padahal, dalam konsep dasar PPK yang dikembangkan Kemdikbud selama ini, sudah terdapat opsi pilihan prioritas nilai sebagai lima nilai utama revolusi mental: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Sayangnya, lima nilai prioritas yang lebih mudah dipahami ini justru tidak masuk dalam Perpres tentang PPK.

Mungkin yang bisa jadi catatan penting adalah bahwa nilai utama yang membingkainya, yaitu nilai-nilai Pancasila. Pasal 3 menegaskan, "PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi...". Jadi, nilai-nilai yang disebut dalam Pasal 3 ini adalah jabaran nilai-nilai Pancasila. Jabaran nilai-nilai Pancasila tentu saja lebih luas dari 18 nilai yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 3.

PPK seharusnya berasumsi, pembentukan karakter di sekolah akan semakin baik apabila semakin

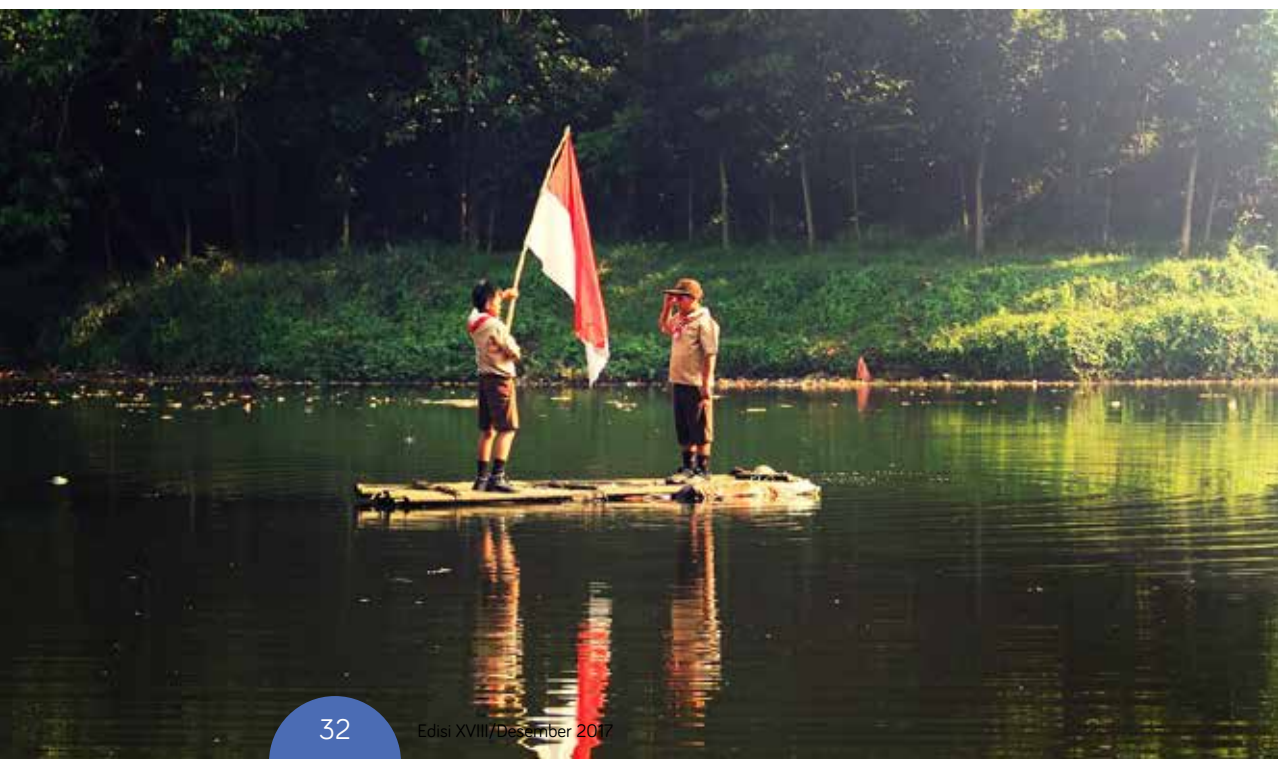
banyak nilai Pancasila yang diajarkan dan dilatihkan dalam diri peserta didik. Artinya, di luar 18 nilai yang dibahas, lembaga pendidikan boleh mengembangkan nilai-nilai lain sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila, norma moral, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai sebuah gerakan nasional, menurut saya, perlu ada nilai-nilai yang menjadi prioritas yang berlaku di seluruh Indonesia sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental dalam lembaga pendidikan. Namun, kalau toh prioritas ini tidak ada dan tidak diatur dalam perpres, masih ada solusinya, yaitu kita serahkan saja pada kewenangan setiap kementerian untuk menentukan prioritas nilai dalam implementasi PPK di lingkungan kerjanya masing-masing.

Terlepas dari kelemahan yang ada, saya melihat Perpres tentang PPK ini sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah kebijakan pendidikan nasional yang bisa mentransformasi pendidikan nasional menjadi lebih baik, mengembalikan roh pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan mengoreksi distorsi antropologi pendidikan yang selama ini terjadi dalam praksis pendidikan kita.

Tulisan ini pernah dimuat pada Kompas, Selasa, 16 September 2017.

Foto: Dok. Lomba Foto Pendidikan Kemendikbud



Penggolong Nomina: Orang, Buah, Ekor

Bahasa Indonesia memiliki sekelompok kata yang membagi-bagi secara konkret dalam kategori tertentu menurut bentuk dan rupanya. Penggolongan semata-mata berdasarkan konvensi masyarakat yang memakai bahasa itu. Berikut ini adalah beberapa kata penggolong dalam bahasa Indonesia.

Orang	Untuk manusia
Ekor	Untuk binatang
Buah	Untuk buah-buahan atau hal lain yang ada di luar golongan manusia dan binatang
Batang	Untuk pohon, rokok, atau barang lain yang berbentuk bulat panjang
Bentuk	Untuk cincin, gelang, atau barang lain yang dapat dibengkokkan atau dilentukkan
Bidang	Untuk tanah, sawah, atau barang lain yang luas dan datar
Belah	Untuk mata, telinga, atau benda lain yang berpasangan
Helai	Untuk kertas, rambut, kain, atau benda lain yang tipis dan halus
Bilah	Untuk pisau, pedang, atau benda lain yang tajam
Utas	Untuk benda, tali, atau benda lain yang kecil panjang
Potong	Untuk baju, celana, atau bagian/potongan suatu barang
Tangkai	Untuk bunga, pena, atau benda lain yang bertangkai
Butir	Untuk kelereng, telur, atau benda lain yang bulat dan kecil
Pucuk	Untuk surat, senapan
Carik	Untuk kertas
Rumpun	Untuk padi, bamboo, atau tumbuhan lain yang berkelompok
Keping	Untuk uang logam
Biji	Untuk mata, jagung, kelereng, padi
Kuntum	Untuk bunga
Patah	Untuk kata
Laras	Untuk senapan
Kerat	Untuk roti, daging

Dalam bahasa Indonesia masa kini telah timbul kecenderungan untuk melakukan dua hal.

Pertama, orang sering meniadakan penggolong jika dari konteksnya jelas tampak bahwa dua hal yang dimaksud adalah tunggal.

Kedua, dalam pemakaiannya ada pula kecenderungan untuk memadatkan jumlah penggolong yang banyak itu menjadi tiga saja, yakni *orang*, *ekor*, dan *buah*. Contohnya:

Pak Anton mempunyai dua *orang* anak.

Pak Anton mempunyai *dua* anak.

Kambing Pak Samsu tiga *ekor*.

Kambing Pak Samsu *tiga*.

Pemakaian penggolong yang asli, **atau penggantinya** dengan *orang*, *ekor*, dan *buah*, serta **penghapusan** penggolongan lain dalam kalimat **dibenarkan** dalam bahasa Indonesia yang baku, **kecuali** jika hal itu **menimbulkan** perbedaan atau pergeseran arti.

Sumber: Buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988

Senarai Kata Serapan

BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
Dratis	Dratisch	Belanda	tegas dan cepat; keras dan berpengaruh cepat
Alamat	Alāmāt	Arab	<ol style="list-style-type: none"> tanda; pertanda (tanda akan terjadi sesuatu) asaran; tujuan: <i>empat kali menembak -- itu tidak kena juga</i> nama orang dan tempat yang menjadi tujuan surat (telegram dan sebagainya); nama dan tempat tinggal seseorang;
Faedah	Fā'idah	Arab	Guna, manfaat, untung, laba
Bijaksana	Wicaksana	Sanskerta – Jawa Kuna	<ol style="list-style-type: none"> selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); arif; tajam pikiran pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dan sebagainya) apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya
Sampan	Sampán	Cina	Perahu kecil
Narapidana	Nara-pidhāna	Sanskerta-Jawa Kuna	Orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum
Antisipasi	Anticipation	Inggris	<ol style="list-style-type: none"> perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi; bayangan; ramalan penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi Perubahan bunyi oleh alat ucap yang menyediakan posisi yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi berikutnya
Akting	Acting	Inggris	<ol style="list-style-type: none"> seni berperan di atas pentas, televisi, atau film penampilan pemeran melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, dan emosi ketika memerankan tokoh cerita di hadapan penonton
Aksesori	Accessorry	Inggris	<ol style="list-style-type: none"> barang tambahan; alat ekstra: <i>radio pada mobil merupakan -- yang digemari banyak konsumen</i> barang yang berfungsi sebagai pelengkap dan pemanis busana: -- <i>yang sedang digemari remaja saat ini adalah jepit rambut dan peniti berwarna sama dengan pakaian yang dikenakan</i>



Membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)? Silakan hubungi kontak berikut:

Unit Layanan Terpadu

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

Gedung C Lantai 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

SMS: 0811976929

Telepon: 021-5703303

Faksimili: 021-5733125

Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman: ult.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan laman khusus tentang PPK sebagai tempat berbagi praktik baik, tanya jawab, dan inspirasi lainnya. Silakan kunjungi:

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mengucapkan



TERIMA KASIH

kepada:



Atas dukungannya
dalam penyelenggaraan

**EUROPALIA
ARTS FESTIVAL
INDONESIA**
10 10 '17 – 21 01 '18



ISSN 2502-7867



9 772502 78606 5



18th ASIAN GAMES
**Jakarta
Palembang
2018**